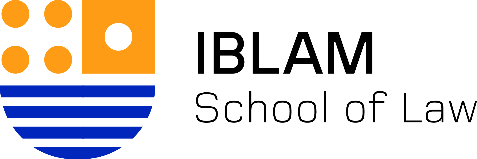
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KOMODITAS BATUBARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum



Oleh :

Nama :Nugroho Fajar Santosa

NPM : 1607350075

PROGRAM SARJANA HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

JAKARTA

2020

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Nama :Nugroho Fajar Santosa

NPM : 1607350075

Judul :

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KOMODITAS BATUBARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan

Jakarta, 2020

Pembimbing,

…………………………….

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KOMODITAS BATUBARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan

tanggungjawab moral penulis

Jakarta, ………………2020

6000,-

**Nugroho Fajar Santosa**

**ABSTRAK**

JudulSkripsi: ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KOMODITAS BATUBARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nama / NPM :Nugroho Fajar Santosa / 1607350075

Pembangunan nasional sebagai bentuk perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.Salah satu Penerimaan Negara Bukan pajak adalah Penerimaan Negara BukanPajak dari Pertambangan Batu bara dan Mineral.Permasalahannya adalah bagaimana kajian analisis yuridis terhadap perubahan tarif penerimaan negara bukan pajak mineral dan batu bara terhadap penerimaan negara bukan pajak dari komoditas batubara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral? Dan bagaimana kajian analisis yuridis terhadap dampak dari penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor PertambanganBatu Baradan Mineral terhadap keuangan negara pasca Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral? Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normatif. Kesimpulannya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2019, PNBP minerba terkumpul sebanyak Rp 45,02 triliun, turun 9,96% dibanding realisasi tahun 2018 yang mencapai Rp 50 triliun. Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Jonson Pakpahan menyampaikan, capaian PNBP terjadi penurunan lantaran tren harga komoditas, khususnya batubara yang tertekan di tahun 2019, ditambah lagi di tahun 2020 muncul wabah penyakit menular covid-19. Ada beberapa dampak dari penurunan penerimaan Negara bukan pajak pada sector pertambangan batu bara dan mineral terhadap keuangan negara**,** salah satunyabagi**p**engusaha tambang dengan kenaikan royalti, maka biaya produksi juga akan naik. Dengan biaya produksi yang naik, maka *striping ratio* akan turun, sehingga batu bara yang diambil/ produksi akan sedikit.

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii**

**SURAT PERNYATAAN iii**

**ABSTRAK iv**

**DAFTAR ISI v**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuandan Manfaat Penelitian 11
4. Metode Penelitan 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17**

1. Keuangan Negara 17
2. Penerimaan Negara Berupa Pajak 30
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak 47

**BAB III KAJIAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KOMODITAS BATUBARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 52**

1. Kajian AnalisisYuridisTerhadapPerubahanTarifPenerimaan Negara BukanPajak Mineral Dan Batu Bara TerhadapPenerimaan Negara BukanPajak Dari Komoditas Batubara Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 TentangJenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 52
2. Pengaturan Tarif dan Dasar Pengenaan Tarif PNBP 66

**BAB IV KAJIAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK DARI PENURUNAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DAN MINERAL TERHADAP KEUANGAN NEGARA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 78**

**BAB V PENUTUP 95**

1. Kesimpulan 95
2. Saran 96

**DAFTAR PUSTAKA 97**